



SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR 27 TAHUN 2021**

TENTANG

**TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DAN
ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, perlu membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; dan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

5. Peraturan Menteri . . .

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024; dan
7. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini sebagai Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- KEDUA : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Tim Pengarah
Memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
 2. Tim Pelaksana ...

2. Tim Pelaksana

a. Ketua:

- 1) Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- 2) Melakukan koordinasi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas baik di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional maupun dengan Tim Kerja Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Nasional; dan
- 3) Melakukan supervisi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas kepada masing-masing Ketua Kelompok Program.

b. Wakil Ketua I/Koordinator I:

Membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua pada Kelompok A. Program Manajemen Perubahan; Kelompok C. Program Penataan dan Penguatan Organisasi; Kelompok D. Program Penataan Tata Laksana; dan Kelompok F. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

c. Wakil Ketua II/Koordinator II:

Membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua pada Kelompok B. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan; Kelompok E. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.

d. Wakil Ketua III/Koordinator III:

Membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua pada Kelompok G. Program Penguatan Pengawasan; Kelompok H. Program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik.

e. Sekretaris:

Mendukung kelancaran tugas Ketua dalam hal administrasi, dokumentasi, dan kesekretariatan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

f. Ketua Kelompok Program:

- 1) Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas sesuai kelompok yang terdiri atas:
 - A. Program manajemen perubahan;
 - B. Program penataan peraturan perundang-undangan;
 - C. Program penataan dan penguatan organisasi;
 - D. Program penataan tata laksana;
 - E. Program penataan system manajemen SDM aparatur;
 - F. Program penguatan akuntabilitas kinerja;
 - G. Program penguatan pengawasan; dan

H. Program peningkatan . . .

H. Program peningkatan kualitas pelayanan publik.

- 2) Melakukan koordinasi dengan Wakil Ketua/Koordinator dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas masing-masing unit kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

g. Anggota:

- 1) Melakukan pengumpulan data, penyiapan bahan dan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas; dan
- 2) Menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas untuk disampaikan secara berkala kepada ketua kelompok program terkait.

KETIGA : Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dapat mengikutsertakan dan bekerjasama dengan para pakar/tenaga ahli sebagai narasumber.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

KELIMA : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tim Pengarah Dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Dan Zona Integritas di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 4 Maret 2021



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN
NASIONAL
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA REFORMASI
BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

**TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H.	Sekretaris Jenderal	Ketua
2.	Laksda TNI Gregorius Agung W. D., M.Tr (Han)	Staf Ahli Bidang Pertahanan Keamanan	Sekretaris
3.	Marsda TNI Dr. Sungkono, S.E., M.Si	Deputi Pengembangan	Anggota
4.	Brigjen TNI Karev Marpaung, S.Sos., M.M.	Bandep Urusan Lingkungan Pemerintahan Negara selaku Plt. Deputi Sistem Nasional	Anggota
5.	Irjen Pol Drs. Sukma Edi Mulyono, M.H.	Deputi Politik dan Strategi	Anggota
6.	Laksda TNI Dr. Dani Achdani, S.Sos., S.E., M.AP.	Deputi Pengkajian dan Penginderaan	Anggota

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

HARJO SUSMORO

**TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS
 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Laksda TNI Gregorius Agung W. D., M.Tr (Han)	Staf Ahli Bidang Pertahanan Keamanan	Ketua
2.	Marsma TNI Shopian Kohar	Kepala Biro POK	Wakil Ketua I / Koordinator I (Pok A, C, D dan F)
3.	Laksma TNI Supendi, S.T.	Kepala Biro Umum	Wakil Ketua II / Koordinator II (Pok B dan E)
4.	Brigjen TNI Drs. Haris Sarjana, M.M., M.Tr. (Han)	Kepala Biro PSP	Wakil Ketua III / Koordinator III (Pok G dan H)
5.	Ir. Hadian Ananta Wardhana, CES	Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Sosial, Desisnas	Sekretaris I
6.	Kolonel Inf Frans Thomas, M.Ikom	Anjak Bidang Evaluasi dan Toleransi Risiko Pembangunan Nasional, Depolstra	Sekretaris II
7.	Tisa Siti Rachmawati, SE.	Analisis Organisasi dan Tata Laksana Sub Kelompok Tata Laksana Kelompok Ortala Biro POK	Anggota
8.	Karina Dewi, S.H.	Analisis Hukum Sub Kelompok Hukum Kelompok Kepegawaian dan Hukum Biro Umum	Anggota
9.	Tri Hariyadi, S.Sos, M.AP	Koordinator Kelompok Organisasi dan Tata Laksana Biro Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan	Ketua Pok A (Program Manajemen Perubahan)

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
10.	Jumadi Saman	Sub Koordinator Kelompok Organisasi dan Fasilitas RB Kelompok Organisasi dan Tata Laksana Biro Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan	Anggota
11.	Enang Suhendar, S.Kom.	Analisis Manajemen Perkantoran Sub Kelompok Tata Laksana Kelompok Organisasi dan Tata Laksana Biro POK	Anggota
12.	Dian Ayu Pertiwi, S.E.	Auditor Ahli Pertama Kelompok Pengawasan Internal Biro PSP	Anggota
13.	Dr. La Piliha, S.Pd., M.Pd.	Plt. Koordinator Kelompok Tata Usaha dan Protokol Biro Umum	Ketua Pok B (Program Penataan PerUUan)
14.	Deviana Oktorina, S.Sos.	Sub Koordinator Kelompok Hukum Kelompok Kepegawaian dan Hukum Biro Umum	Anggota
15.	Andreanus, S.H.	Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum Sub Kelompok Hukum Kelompok Kepegawaian dan Hukum Biro Umum	Anggota
16.	Amalia Fajarina, S.H.	Analisis Hukum Sub Kelompok Hukum Kelompok Kepegawaian dan Hukum Biro Umum	Anggota
17.	Nurman Kahar, S.IP., M.AP.	Kabag Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa, Biro Umum	Ketua Pok C (Program Penataan dan Penguatan Organisasi)
18.	Wim Ruska, A.Md.	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Sub Koordinator Kelompok Pengadaan Bagian Perlengkapan Biro Umum	Anggota
19.	Nasrul Ma'arif, S.Sos.	Analisis Kelembagaan Sub Kelompok Organisasi dan Fasilitas RB Kelompok Organisasi dan Tata Laksana Biro POK	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
20.	Helfrida Sinaga, SE.	Auditor Ahli Pertama Kelompok Pengawasan Internal Biro PSP	Anggota
21.	Yadi Kurniawanto, S.T.	Koordinator Kelompok Keuangan Biro POK	Ketua Pok D (Program Penataan Tata Laksana)
22.	Riza Savitri, A.Md.	Kasubbag Protokol dan TU Pimpinan Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa Biro Umum	Anggota
23.	Maulidya Nurisya, S.E.	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Sub Kelompok Tata Laksana	Anggota
24.	Nadia Talita Putri, S.I.P.	Analisis Persandian Sub Kelompok Protokol dan Pengamanan Kelompok TU dan Protokol Biro Umum	Anggota
25.	Imam Supriyadi, S.E.	Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Hukum Biro Umum	Ketua Pok E (Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur)
26.	Reno Ardiansyah, S.Kom.	Sub Koordinator Kelompok Disiplin dan Pengembangan Pegawai Kelompok Kepegawaian dan Hukum Biro Umum	Anggota
27.	Agus Suprpto, S.Sos.	Sub Koordinator Kelompok Mutasi Peg dan Adm Kepeg Kelompok Kepeg dan Hukum Biro Umum	Anggota
28.	Renie Dwi Sulistyani, S.M.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Sub Kelompok Mutasi Pegawai dan Adm Kepeg Kelompok Kepegawaian dan Hukum Biro Umum	Anggota
29.	Haryo Sasmito, S.E.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Sub Kelompok Mutasi Pegawai dan Adm Kepeg Kelompok Kepegawaian dan Hukum Biro Umum	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
30.	Kolonel Laut (S) Abdul Rozaq, S.T., M.Tr.Hanla., M.M.	Kabag Perencanaan Biro Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan	Ketua Pok F (Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja)
31.	Prasetyo, A.Md.	Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan Kelompok Perencanaan Biro POK	Anggota
32.	Genanto Atmadiredja, S.E.	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Subbag Evaluasi dan Pelaporan Bagian Perencanaan Biro POK	Anggota
33.	Bayu Prawiradisma Siregar, S.E.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan Sub Kelompok Rencana Program dan Kinerja Kelompok Perencanaan Biro POK	Anggota
34.	Titin Mardyaningsih, S.E., M.M.	Koordinator Kelompok Pengawasan Internal Biro Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal	Ketua Pok G (Program Penguatan Pengawasan)
35.	Daniel Maruli Tua Manik, S.E.	Auditor Ahli Pertama Kelompok Pengawasan Internal Biro PSP	Anggota
36.	Alvin Rayinda Pramasha, S.E.	Analisis Laporan Hasil Pengawasan Sub Kelompok Tata Usaha Kelompok Pengawasan Internal Biro PSP	Anggota
37.	Riedjanti Restu Biandari, S.E.	Analisis Laporan Hasil Pengawasan Sub Kelompok Tata Usaha Kelompok Pengawasan Internal Biro PSP	Anggota
38.	Kolonel Laut (P) Imam Hidayat, S.E., M.M.	Kabag Sistem Informasi Biro Persidangan, Sisfo, dan Pengawasan Internal	Ketua Pok H (Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
39.	Dedy Purwadi, A.Md.	Sub Koordinator Kelompok Teknologi Informasi Kelompok Sisfo Biro PSP	Anggota
40.	Fauziah Nurunnajmi, S.E.	Analisis Hubungan Antar Lembaga Sub Kelompok Hubungan Antar Lembaga Kelompok Persidangan dan Humas Biro PSP	Anggota
41.	Galih Pamungkas Sabriarso, A.Md.	Pengelola Instalasi Teknologi Informasi Sub Kelompok TI Kelompok Sisfo Biro PSP	Anggota



SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

HARJO SUSMORO